

Pembangunan Berkelanjutan Atau Emisi Nol Persen: Komunikasi Perubahan Iklim Presiden Joko Widodo di COP26

Andika Hendra Mustaqim

Universitas Bina Sarana Informatika
e-mail: andika.ahq@bsi.ac.id

ABSTRAKSI

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi tentang komunikasi perubahan iklim yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau dikenal dengan COP26 di Glasgow, Inggris. Fokus utama penelitian ilmiah ini adalah mengupas strategi dan model komunikasi perubahan iklim dengan basis pada narasi-narasi yang disampaikan Presiden Jokowi. Metode penelitian yang diterapkan adalah narasi risiko iklim dengan dasar pendekatan kualitatif dengan paradigma intepretif. Penelitian ini menemukan bahwa Presiden Jokowi mengutamakan topik emisi nol persen dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan strategi komunikasi perubahan iklim Presiden Jokowi pada COP26 lebih mengacu pada fakta dan data; kebijakan dan mekanisme; tuntutan; target dan prioritas; dan agenda kepemimpinan bahwa Presiden Jokowi berharap menjadi pemimpin global dalam perubahan iklim. Adapun model komunikasi perubahan iklim Presiden Jokowi didasarkan pengulangan dan intonasi pada kata dan frasa; serta pendekatan naratif personal yang merujuk kekuasaan, otoritas, pengetahuan, ideologi dan identitas. Hasil penelitian ini juga bisa diaplikasikan pada ranah praktis oleh para pemimpin dan pemegang kebijakan perubahan iklim untuk membangun komunikasi yang lebih baik kepada publik.

Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Emisi Nol Persen, Komunikasi Iklim, COP26, Joko Widodo

ABSTRACT

This study aims to explore the climate change communication conducted by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) at the United Nations (UN) climate change conference, also known as COP26 in Glasgow, United Kingdom. The main focus of this scientific research is to explore climate change communication topics, strategies and models based on the narratives presented by President Jokowi. The research adopts a climate risk narrative based on a qualitative approach with an interpretive paradigm. This study finds that President Jokowi prioritized the topic of zero percent emissions and sustainable development. Meanwhile, President Jokowi's climate change communication strategy at COP26 refers more to facts and data; policies and mechanisms; demands; targets and priorities; and a leadership agenda that President Jokowi hopes to become a global leader on climate change. President Jokowi's climate change communication model is based on repetition and intonation in words and phrases; and a personal narrative approach that refers to power, authority, knowledge, ideology and identity. The results of this study can also be applied to the practical realm by leaders and climate change policy makers to build better communication with the public.

Keyword: Sustainable Development, Net Zero Emission, Climate Communication, COP26, Joko Widodo

PENDAHULUAN

Alam sudah berubah. Bencana terus berdatangan. Korban sudah berjatuhan. Kelaparan dan kemiskinan semakin meningkat karena gagal panen terus mengancam. Siapa yang disalahkan? Perubahan iklim kah?

Narasi perubahan iklim terus bergema di media massa, baik televisi hingga koran, serta media sosial mulai dari Twitter hingga YouTube. Di media sosial, berbagai tagar tentang perubahan iklim seperti #climatechange hingga #globalwarning kerap menjadi *trending topic* (Pearce, Niderer, & Ozkula, 2019; Vu et al., 2021). Media massa juga memberikan gambaran representasi bagaimana tindakan perubahan iklim (Knowles & Scott, 2021) hingga memberikan pengaruh terhadap kesadaran publik terhadap isu risiko hingga dampaknya (Sampei & Aoyani-Utsui, 2009).

Banyak orang mulai dari rakyat jelata hingga para pemimpin negara berbicara tentang perubahan iklim karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Perubahan iklim menjadi topik yang tidak habis untuk didiskusikan oleh siapa saja dan di mana pun.

Semua orang pun sepertinya berhak berbicara mengenai perubahan iklim. Meskipun banyak orang juga tak tahu tentang esensi seperti apa itu perubahan iklim. Hingga akhirnya, kesimpangsiuran pun terus terjadi tentang perubahan iklim. Manifestasi dan orientasi perubahan iklim pun menjadi bias dan terdistorsi.

Hingga sebagian kalangan menyebut, hanya ilmuwan saja yang tahu dan paham hingga layak berbicara perubahan iklim. Sebagian lagi menyebutkan dikarenakan perubahan iklim itu merupakan hal lazim di media massa dan media sosial, maka itu menjadi hak publik membicarakan dan

mengeksplorasiannya. Akibatnya, isu perubahan iklim semakin ganas dan luas.

Perubahan iklim bukan hanya menjadi bahan diskusi di forum ilmiah dengan gaya bahasa serta rumus yang sulit dipahami publik. Perubahan iklim juga menjadi bahan bercanda di kafe sambil minum kopi dengan gelas plastik hingga berjam-jam lamanya. Perubahan iklim menjadi topik hangat para petani yang beristirahat di gubuk di tengah sawah yang gagal panen. Perubahan iklim juga menjadi tema pertengkaran antara nelayan dan bos pemilik yang stres karena penurunan jumlah tangkapan mereka. Hingga perubahan iklim menjadi diskusi hangat para politikus di gedung parlemen dengan pendingin ruangan dengan dalih mendengar aspirasi masyarakat. Para pemimpin baik dari level desa hingga Istana Negara juga berusaha keras merumuskan kebijakan untuk menangkal dan menangani perubahan iklim.

Isu perubahan iklim semakin menghangat bersamaan dengan digelarnya Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau dikenal dengan COP26 di Glasgow, kota tua yang menjadi kelahiran para pemikir hebat dunia, di Skotlandia, pada 31 Oktober 2021 hingga 12 November 2021. Puncak COP26 adalah pada 1-2 November ketika para pemimpin dunia berkumpul dan menyatakan komitmen untuk penanganan perubahan iklim. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) juga menghadiri momen penting tersebut untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam penanganan permasalahan global tersebut.

Jokowi juga menjadi perhatian dalam COP26 karena Indonesia merupakan negara yang diharapkan memiliki peran besar dalam penanganan perubahan iklim. Apalagi, Indonesia juga merupakan negara besar di Asia Tenggara yang memiliki pengaruh besar di kawasan. Meskipun Indonesia tergolong sebagai negara berkembang, tetapi luas wilayah Indonesia dengan besarnya jumlah penduduk menjadikan suatu pertimbangan penting.

Yang menjadi perhatian pada COP26 adalah komunikasi perubahan iklim yang dilakukan Presiden Jokowi pada panggung global ketika sebagian orang di dunia memperhatikan ke sana. Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya dengan narasi untuk menunjukkan bagaimana komitmen Indonesia dalam menangani perubahan iklim pada momen tersebut. Respons bukan hanya di luar negeri dan dalam negeri juga bermunculan menanggapi pidato yang disampaikan Presiden Jokowi.

Berbagai respons tersebut menunjukkan bahwa Jokowi memiliki kredibilitas dalam berkomunikasi. Jokowi merupakan pemimpin yang memilih kepandaian dalam berkomunikasi untuk membangun hubungan dengan rakyatnya dan menciptakan gerakan sosial (Mustaqim, 2021). Jokowi juga dikenal dengan komunikasi politik simboliknya dengan gaya bahasa dengan aksan Jawa yang kental (Susila et al., 2020).

Kemudian, komunikasi perubahan iklim yang dilakukan Presiden Jokowi menjadi perhatian publik. Hal itu dilakukan apa yang disampaikan Jokowi merepresentasikan Indonesia dalam penanganan perubahan iklim. Apalagi, apa yang ditunjukkan Jokowi juga memosisikan Indonesia dalam percaturan geopolitik global di mana berpijak dan berpihak.

Pembangunan berkelanjutan merupakan isu penting dari apa yang disampaikan oleh Jokowi. Presiden Indonesia menempatkan Indonesia tidak hanya mau didekte oleh negara-negara maju untuk memaksakan untuk melakukan kewajiban penanganan perubahan iklim tanpa adanya kompensasi yang didapatkan Indonesia. Dengan isu perubahan iklim, Presiden Jokowi juga menarasikan kalau Indonesia terbuka untuk investasi industri ramah lingkungan.

Namun demikian, Presiden Jokowi juga menunjukkan Indonesia bukan hanya berkomitmen dalam penanganan perubahan iklim, tetapi juga sudah mewujudkannya dalam berbagai langkah nyata. Bukan hanya sekadar retorika dan wacana yang diungkapkan oleh Jokowi, tetapi dia memberikan data dan fakta tentang keberhasilan Indonesia.

Komunikasi perubahan iklim yang ditempuh Presiden Jokowi menjadi hal penting. Itu dikarenakan menunjukkan bagaimana dia merupakan pemimpin besar dunia yang mampu menunjukkan Indonesia dalam panggung global pada COP26. Dengan komunikasi perubahan iklim versi Jokowi memberikan garis bawah bahwa Indonesia bukan hanya menjadi perhatian, tetapi mampu menawarkan peluang kepada dunia internasional.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi komunikasi perubahan iklim yang dilakukan Presiden Jokowi. Penelitian ilmiah berbasis kajian komunikasi ini akan mengulas dan menganalisis beberapa pertanyaan penting (1) isu dalam komunikasi perubahan iklim Presiden Jokowi pada COP26, (2) strategi komunikasi perubahan iklim Presiden Jokowi pada COP26, dan (3) model komunikasi perubahan iklim Presiden Jokowi pada COP26. Penelitian ini bukan hanya memberikan tawaran dialektika teori semata, tetapi bisa memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan komunikasi perubahan iklim yang bisa diterapkan para pemimpin dan praktisi komunikasi.

1. Komunikasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim kerap mengalami definisi yang salah (Pielke, 2005), itulah menjadikan penting pada penelitian ini mendefinisikan tentang perubahan iklim. Perubahan iklim selalu dikaitkan dengan emisi gas rumah kaca karena penggunaan bahan bakar berbasis fosil dan menjadi perhatian sejak Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen pada Desember 2009 (Scott & Becken, 2010). Perubahan iklim memiliki dampak yang luas, mulai dari ekonomi makro dalam jangka panjang (Khan et

al. 2021), gangguan ekosistem laut (Khan et al. 2021), dan panen pertanian (Dubey & Sharma, 2018).

Hingga kemudian perubahan iklim justru menjadi isu politik dan geopolitik karena menyangkut kebijakan yang membutuhkan komitmen semua negara di dunia. Kepedulian terhadap perubahan iklim karena berkaitan dengan risiko untuk generasi mendatang karena dipenuhi dengan ketidakpastian dan bahaya di depan mata. Namun demikian, komunikasi yang buruk, kesalahan informasi dan asumsi yang salah kerap mewarnai isu perubahan iklim dalam wacana sosial (Etkin & Ho, 2007). Apalagi, komunikasi menjadi hal penting karena di era post-truth (pasca-kebenaran) cenderung mengabaikan rasionalitas dan memprioritas emosi (Mustaqim, 2018).

Komunikasi perubahan iklim menjadikan komunikasi sebagai alat dan strategi untuk mengangkat isu perubahan iklim dengan berbagai aspek komunikasi, terutama penggunaan peranan bahasa seperti metafora, kata-kata, strategi, kerangka dan narasi (Nerlich, Koteyko, & Brown, 2009). Fokus utamanya terhadap pemahaman publik terhadap perubahan iklim, faktor yang mempengaruhi pemahaman publik, pembingkauan dan peliputan media, dampak media hingga persepsi risiko (Nerlich, Koteyko, & Brown, 2009). Komunikasi perubahan iklim cenderung menggunakan penggunaan pengetahuan dalam dialog global (Dudman & Wit, 2021), retorika dan pembingkauan (Supran & Oreskes, 2021), ekologi media (Weitkamp et al., 2021) dan memiliki tujuan untuk membangun strategi komunikasi lingkungan yang efektif (Motta, Ralston & Spindel, 2021).

Dalam komunikasi perubahan iklim juga bersentuhan langsung dengan kepemimpinan pemerintahan karena berkaitan dengan pemegang kebijakan. Sorotan itu dikarenakan pemimpin berusaha ingin membangun citra sebagai pemimpin lingkungan (Akiyama, 2013) dan mempengaruhi publik dengan opini yang dibangun para pemimpin (Nisbet & Kotcher, 2009).

2. Narasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim bukan hanya mengenai angka dan rumus. Tetapi, itu menjadi bagian dalam kehidupan keseharian manusia sehingga menjadi narasi yang tersebar mulai dari buku teks pelajaran sekolah, media massa hingga media sosial.

Perubahan iklim menjadi kajian penting dalam narasi karena berkaitan langsung dengan aspek komunikasi di masyarakat. Pembuatan keputusan tentang perubahan iklim juga berkaitan aspek rasional dan narasi (Holzhausen & Grecksch, 2021). Narasi perubahan iklim juga menjadi gaya hidup (Ojerstad & Flottum, 2021), serta mempengaruhi tindakan iklim (Howarth & Parsons, 2021).

Narasi juga menjadi bagian yang melekat pada kepemimpinan dalam menentukan kebijakan perubahan iklim. Selanjutnya, naratif berkaitan dengan personal juga

memiliki pendekatan seperti kekuasaan, otoritas, pengetahuan, ideologi dan identitas untuk menunjukkan legitimasi dan dominasi (Kristen, 1989). Untuk menganalisis naratif personal tersebut, maka peneliti perlu menggunakan teks dan konteks di naratif personal ditempatkan sebagai *performance storytelling*, interaksi percakapan, proses sosial, dan *political praxis* (Kristen, 1989).

Narasi bukan semata tentang teks, tetapi juga berkaitan dengan performa di mana salah satunya berkaitan langsung dengan intonasi. Intonasi menunjukkan bagaimana suatu hal penting atau tidak dengan sebagai suatu penegasan. Penelitian ini menggunakan konsep kajian intonasi dengan basis fonetik dan fonologi yang pernah diteliti oleh Singh (2014). Dengan dasar pembagian tiga kalimat yakni deklaratif, imperatif dan interogatif, Singh (2014) membagi intonasi menjadi lima bagi yakni *normal statement*, *simple emphatic*, *confirmation*, *information*, dan *doubtful/exclamation*. Kelima enis intonasi itu menjadi dasar untuk menentukan suatu pernyataan yang diungkapkan oleh pembicara.

METODOLOGI

Paradigma yang menjadi ideologi pada penelitian adalah intepretif. Hadirnya paradigma interpretif pada penelitian berkaitan dengan perubahan iklim umumnya bersifat penilaian (Altschuler & Bwonlee, 2016), cenderung bersifat konstruksi sosial (Paschen & Ison, 2014), serta bisa menghasilkan suatu kebijakan (Feindt & Netherwood, 2012). Paradigma interpretif juga masih satu mahzab dengan pendekatan kualitatif yang menjadi pijakan pada penelitian.

Adapun metode penelitiannya adalah narasi risiko iklim atau dikenal dengan Climate Risk Narratives (CRN) yang dikembangkan oleh (Jack et al. 2020). CRN merupakan pendekatan narasi sebagai alat komunikasi dan pertautan dengan basis cerita untuk mendapatkan pembelajaran dan nilai sehingga menghasilkan formulasi narasi melalui proses pertautan yang mendalam (Jack et al. 2020). Orientasi utama pada CRN adalah upaya mengembangkan pembuatan kebijakan dan mematakan arah masa depan terkait isu perubahan iklim.

Penelitian naratif sebenarnya tidak hanya fokus pada teks semata (Adi & Mustaqim, 2017), tetapi juga memperhatikan kritik sosial. Metode naratif juga sebaiknya berusaha memahami sistem sosial-ekologi hingga kognitif (Paschen & Ison, 2014), sehingga nantinya akan menghasilkan desain partisipatori berbasis pengetahuan lokal dan mempengaruhi kapasitas afektif-emotif.

Penggalan data pada penelitian ini berbasis pada pidato yang dilakukan Presiden Jokowi di COP26 dengan menganalisis teks dan video. Untuk memahami konteks sosial, peneliti menggunakan data sekunder dari pemberitaan tentang pidato Presiden Jokowi dan isu sekitar penanganan perubahan iklim di media daring dan

koran yang memiliki reputasi. Dengan demikian, penelitian memiliki data yang komprehensif untuk mendukung hasil penelitian yang solid dan tepat sasaran.

Analisis pada penelitian ini mengandalkan interpretasi dengan basis perspektif pada teori tentang komunikasi perubahan iklim sehingga menghasilkan rekomendasi penelitian yang relevan dan memiliki makna. Itu dikarenakan peneliti CRN lebih bersifat trans-disiplin (Jack et al., 2020) dengan tujuan mengkomunikasikan risiko perubahan iklim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan akan dibagi dalam tiga bagian yakni, topik, strategi dan model komunikasi perubahan iklim Presiden Jokowi. Ketiga hal tersebut bertujuan untuk menjabarkan pertanyaan dan rumusan masalah pada penelitian ini.

1. Topik Komunikasi Perubahan Iklim Presiden Jokowi

Presiden Jokowi membawa misi tertentu saat menghadiri COP 26. Bukan hanya untuk menunjukkan komitmen dalam penanganan perubahan iklim semata, tetapi dia juga menegaskan tentang arti penting kebutuhan dan keinginan Indonesia sebagai negara berkembang. Ada dua topik dalam misi Presiden Jokowi dalam komunikasi perubahan iklim dalam COP26 yang ditunjukkan pada pidatonya.



Sumber: Akun YouTube Sekretariat Presiden (2021)

Gambar 1. Presiden Jokowi berbincang-bincang dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Sekjen PBB Antonio Guterres pada COP 26 pada 1 November 2021.

Pertama, emisi nol persen menjadi topik menarik dalam narasi yang disampaikan Presiden Jokowi pada COP26. Presiden Jokowi bukan hanya sekadar menyampaikan narasi yang berisi komitmen semata. Tetapi dia menunjukkan data-data yang menggembirakan tentang komitmen Indonesia dalam menangani perubahan iklim.

Komunikasi melalui narasi perubahan iklim yang ingin disampaikan Jokowi agar dunia mendengar dan melihat tentang apa saja yang sudah dilakukan Indonesia. Indonesia sudah bergerak jauh melampaui banyak negara dalam mewujudkan negara yang ramah lingkungan.

Indonesia juga sudah melakukan aksi nyata dalam penanganan perubahan.

Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 22 persen di tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektare sampai di (tahun) 2024, terluas di dunia. (Widodo, 2021)

Narasi tentang deforestasi menjadi hal utama tentang kesuksesan penanganan perubahan iklim. Tidak hanya mengandalkan sumber daya alam sebagai nilai jual Indonesia, ekosistem mobil listrik serta pembangkit listrik energi terbaru juga sebagai wujud nyata. Mendorong kawasan industri hijau menjadi andalan Jokowi.

Komunikasi perubahan iklim yang disampaikan Jokowi memberikan pandangan bahwa Indonesia menjadi negara sudah banyak berusaha dan menunjukkan komitmen dalam emisi nol persen. Namun, hal itu tidak berhenti sampai di situ saja. Indonesia ingin bergerak ke depan dan terus berkontribusi.

Kedua, pembangunan berkelanjutan menjadi topik yang sangat penting pada pidato Presiden Jokowi pada COPS26. Itu dikarenakan Indonesia harus terus mengejar dan mengamankan pertumbuhan ekonomi dan menghidupkan sektor riil. Pembangunan berkelanjutan merupakan sinonim dari peningkatan kesejahteraan kepada seluruh elemen masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu, maka tentunya diperlukan segala upaya dari segala pihak.

Tak bisa disangkal jika jika pembangun berkelanjutan merupakan lawan dari emisi nol persen. Jika ingin terus membangun, maka Indonesia membutuhkan suplai energi listrik yang besar di mana pembangkit listrik di Indonesia masih mengandalkan batu bara. Hal itu bertentangan dengan komitmen kebijakan emisi nol persen. Kemudian, pembangunan juga membutuhkan kelancaran jaringan logistik sehingga memerlukan bahan bakar minyak berbasis fosil yang melimpah. Itu juga berlawanan dengan komitmen emisi nol persen.

Namun demikian, Presiden Jokowi memberikan solusi dalam menawarkan untuk keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. Dia menginginkan tentang pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan khususnya untuk penanganan perubahan iklim. Dengan pendanaan itu menjadikan harapan untuk terus mengalihkan arah pembangunan dari berbasis fosil ke energi terbaru.

Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif, serta pembiayaan campuran, obligasi hijau dan sukuk hijau. Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. (Widodo, 2021)

Kesan yang muncul adalah Indonesia meminta negara maju untuk memberikan kontribusi bukan hanya

menuntut negara berkembang untuk berkomitmen terhadap emisi nol persen dengan menurunkan laju pembangunan tanpa memberikan solusi. Presiden Jokowi mendorong negara maju untuk berkontribusi dengan pendanaan untuk penanganan perubahan iklim.

Jokowi juga menuntut pasar karbon dan harga karbon dengan ekosistem ekonomi karbon yang adil. Hal itu merupakan bentuk kritik tajam ke negara maju yang hanya memberikan komitmen tanpa ada wujud nyata dalam mewujudkan ekonomi karbon. Ketika keadilan itu bisa ditegakkan, Indonesia merupakan negara yang diuntungkan karena memiliki hutan yang luas.

Komunikasi perubahan iklim yang dilakukan Jokowi sangat terkesan sangat menunjukkan pandangan nasionalisme yang sangat kuat. Narasi perubahan iklim yang ingin ditunjukkan Presiden Jokowi bahwa Indonesia tidak mau menjadi mitra yang pasif, tetapi negara yang aktif dengan mendapatkan keuntungan dari penanganan perubahan iklim demi mengamankan pembangunan berkelanjutan.

2. Strategi Komunikasi Perubahan Iklim Presiden Jokowi

Sebagai pemimpin negara dan pemerintahan, Presiden Jokowi memiliki strategi komunikasi khusus dalam menyampaikan isu perubahan iklim pada momen bergengsi seperti COP26. Strategi komunikasi perubahan iklim tersebut tidak dibangun dalam hitungan jam, tetapi melalui proses komunikasi. Itu dikarenakan strategi komunikasi bukan hanya tentang performa dan konten semata, tetapi menyangkut proses kebijakan dan keterkaitan serta keterlibatan berbagai pihak.



Sumber: Akun YouTube Sekretariat Presiden (2021)
Gambar 2. Pidato Presiden Jokowi pada COP 26 pada 2 November 2021.

Penelitian ini menemukan lima strategi komunikasi perubahan iklim yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pidato COP26. Kelima strategi tersebut berbasis pada narasi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Itu juga didasarkan pada analisis dan interpretasi dengan pemahaman konteks tentang agenda Indonesia pada COP26.

Pertama, mengkomunikasikan fakta dan data tentang penanganan perubahan iklim. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan sebagai upaya menyampaikan prestasi. Pencapaian merupakan upaya kesuksesan pemerintahan Jokowi dalam isu perubahan iklim. Mulai penurunan laju deforestasi terendah dalam 20 tahun, penurunan kebakaran sebesar 22 persen pada 2020, rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar, dan rehabilitasi tiga juta lahan kritis merupakan data dan fakta yang disajikan Presiden Jokowi.

Kedua, mengkomunikasikan kebijakan dan mekanisme penanganan perubahan iklim. Dengan dasar data yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan hasil dari kebijakan dan mekanisme penanganan isu tersebut. Dengan demikian, efektivitas kesuksesan kebijakan juga harus diberitahukan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menangani isu perubahan iklim dengan baik. Nantinya, itu bisa menjadi rujukan dan pembelajaran bagi negara lain. Bagi Presiden Jokowi, hal itu bisa menjadi suatu pengakuan atas efektivitas dan efisiensi kebijakan yang ditempuhnya.

Ketiga, mengkomunikasikan tuntutan atas upaya penanganan perubahan iklim. Bahan paling mudahnya adalah Presiden Jokowi menuntut imbal balik dari negara maju atas kesuksesan yang telah dihasilkannya. Jika tidak dikomunikasi dan dipertegas dalam kalimat yang eksplisit, maka negara maju akan mengabaikannya karena hal menyangkut dana besar. Tuntutan Presiden Jokowi menjadi bentuk komunikasi perubahan iklim yang sangat transparan dan berani. Itu dikarenakan jarang pemimpin menyampaikan narasi untuk menggugat negara maju agar peduli dengan negara berkembang.

Keempat, mengkomunikasi target dan prioritas bahwa Indonesia menjadi motor penggerak dalam penanganan perubahan iklim. Indonesia bukan negara yang hanya menjadi penonton dalam kompetisi penanganan perubahan iklim. Setiap negara ingin menjadi terdepan atau pun terbelakang dalam penanganan perubahan iklim. Presiden Jokowi menginginkan Indonesia dalam posisi terdepan di antara negara berkembang untuk menangani perubahan iklim.

Kelima, mengkomunikasikan agenda kepemimpinan bahwa Presiden Jokowi berharap menjadi pemimpin global dalam perubahan iklim. Presiden Jokowi merupakan pemimpin yang berawal dari Wali Kota Solo, kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Presiden Republik Indonesia, sehingga dia memiliki kesempatan menjadi pemimpin global. Itu merupakan ambisi yang bertanggungjawab karena mampu menempatkan Indonesia pada posisi geopolitik yang tepat, bukan hanya menguntungkan negara maju semata, tetapi juga Indonesia layak mendapatkan keuntungan besar dalam penanganan perubahan iklim.

Dengan mendapatkan pengakuan sebagai pemimpin global, posisi Presiden Jokowi akan meningkat karena bukan hanya dilihat dalam skala nasional semata, tetapi

popularitasnya bisa menjangkau seluruh dunia. Suara dan gerakannya dalam kontribusi penanganan perubahan iklim bisa mendapatkan rekognisi yang berimbas pada popularitasnya meningkat di antara pemimpin dunia lainnya. Pengaruhnya juga tidak hanya sebatas Indonesia semata, tetapi bisa menjadi lintas batas negara.

Dengan demikian, kelima strategi komunikasi perubahan iklim tersebut menghadirkan sentuhan dari nasional ke global, dan sebaliknya, dari global ke nasional. Komunikasi perubahan iklim di mana Indonesia bisa memberikan kontribusi kepada komunitas internasional, tetapi dunia juga harus memberikan imbalan. Itu dikarenakan tidak ada perjuangan tanpa biaya, dan tidak ada pembangunan tanpa adanya anggaran. Strategi komunikasi tersebut akan teruji dengan kebijakan lanjutan dari Presiden Jokowi dalam penanganan perubahan iklim kedepannya.

3. Model Komunikasi Perubahan Iklim Presiden Jokowi

Model komunikasi perubahan iklim Presiden Jokowi yang menjadi perhatian pada penelitian adalah pada pengulangan dan intonasi pada kata dan frasa. Itu didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Singh (2014). Intonasi menjadi hal penting dalam model komunikasi perubahan iklim karena hal itu menyangkut adanya narasi yang disampaikan untuk menunjukkan penegasan dan kepentingan Indonesia.



Sumber: Akun YouTube Sekretariat Presiden (2021)
Gambar 3. Pidato Presiden Jokowi Bersama Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada COP 26 pada 1 November 2021.

Tabel 1. Pengulangan dan into pada pidato Jokowi pada COP26.

No	Kata/ Frasa	Jumlah	Intonasi
1	Perubahan iklim	5	<i>Simple emphatic</i>
2	Indonesia	7	<i>Normal statement</i>
3	Kontribusi	4	<i>Doubtful/Exclamation</i>
4	Pembangunan	3	<i>Confirmation</i>
5	Pembiayaan	3	<i>Simple emphatic</i>
6	Karbon	2	<i>Doubtful/Exclamation</i>
7	Hutan	2	<i>Information</i>

Sumber: Analisis dikembangkan dari akun YouTube Sekretariat Presiden (2021) dan www.presidentri.go.id (2021)

Hal paling menarik adalah pada kata “perubahan iklim” dan “pembiayaan” karena menunjukkan intonasi *simple emphatic*. Itu dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan di mana Presiden Jokowi menginginkan bahwa kontribusi Indonesia dalam penanganan perubahan iklim juga harus mendapatkan apresiasi dan pengakuan bukan dalam bentuk tepuk tangan dan pujian semata. Itu sebagai upaya untuk menarik dukungan dan kontribusi lebih dari negara maju terhadap penanganan perubahan iklim.

Intonasi yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan ketika menyebutkan kata “pembangunan” menunjukkan *confirmation*. Upaya konfirmasi itu menunjukkan kalau pembangunan merupakan upaya yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam upaya terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi, pembangunan harus terus berjalan sehingga penanganan perubahan harus berjalan beriring dengan pembangunan. Jika salah satu dari kedua hal tersebut berhenti, maka terjadi kepincangan bagi Indonesia.

Berkaitan dengan emisi nol persen, hal yang mengejutkan ketika berbicara dengan “karbon” justru mengarah kepada *doubtful/exclamation*. Ada banyak keraguan ketika mengatakan kata “karbon”. Sepertinya ada banyak ketidakpercayaan dari Presiden Jokowi terhadap komitmen ekosistem karbon yang berkeadilan untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia dan negara berkembang bisa mendapatkan keadilan dalam penanganan perubahan iklim.

Ha yang sangat standar adalah intonasi penyebutan kata “Indonesia” yang mengarah sebagai *normal statement*. Itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi memang sudah terbiasa mengatakan kata “Indonesia”. Itu juga menyatakan bahwa kata “Indonesia” adalah suatu identitas yang harus terus dibawa dan diusung dalam narasi perubahan iklim.

Selanjutnya, model komunikasi perubahan iklim Presiden Jokowi pada COP26 akan dianalisis dengan pendekatan naratif personal (Kristen, 1989). Analisis tersebut melibatkan beberapa elemen pada naratif seperti kekuasaan, otoritas, pengetahuan, ideologi dan identitas. Analisis tersebut memang bersifat naratif personal karena penelitian ini memang fokus pada teks dengan memperhatikan konteks.

Tabel 2. Pendekatan narasi personal

No	Kata/ Frasa	Kata/ Frasa
1	Kekuasaan/ <i>Power</i>	Indonesia, global
2	Otoritas/ <i>Authority</i>	kemakmuran dan pembangunan, melangkah maju
3	Pengetahuan/ <i>Knowledge</i>	net zero emission, transfer teknologi
4	Ideologi/ <i>Ideology</i>	kontribusi
5	Identitas/ <i>Identity</i>	negara-negara berkembang, negara maju

Sumber: Analisis dikembangkan dari akun YouTube Sekretariat Presiden (2021) dan www.presidentri.go.id (2021)

Dari tabel 2 menunjukkan posisi dan pendekatan narasi personal perubahan iklim yang dilakukan Presiden Jokowi. Arah tersebut menunjukkan konstruksi komunikasi perubahan iklim yang bergerak dari unjuk diri Presiden Jokowi untuk memosisikan diri sebagai pemimpin terdepan dalam penanganan perubahan iklim. Selain itu, dia juga ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam mewujudkan komitmen emisi nol pesen dan tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan.

Kekuasaan merupakan menjadi elemen pertama karena narasi personal menunjukkan bagaimana seseorang memiliki kuasa. Itu jelas terepresentasi pada pidato Presiden Jokowi pada COP26. Itu ditunjukkan dengan kata “Indonesia” dan “global”. Kedua kata tersebut berkaitan dengan posisi kekuasaan.

Ketika berbicara Indonesia, maka hal itu menyangkut kepentingan dalam negeri negara tersebut. Itu sangat ditegaskan Presiden Jokowi. Sedangkan untuk global, maka itu menyangkut posisi Indonesia sebagai warga global terutama dalam penanganan perubahan iklim. Kedua posisi sebenarnya tidak berbeda, tetapi dalam geopolitik penanganan perubahan iklim justru terlihat suatu hal yang kontras.

Indonesia seperti mayoritas negara di dunia juga selalu mengutamakan kepentingan nasional dan rakyatnya. Ada banyak hal dalam penanganan perubahan menyebabkan adanya pelambatan pembangunan dan menurunkan investasi karena emisi nol persen bisa dikatakan bertolakbelakang dengan pembangunan. Sedangkan global memberikan dorongan untuk menangani perubahan iklim dengan pengurangan emisi dan penghapusan bahan bakar fosil secara bertahap.

Kemudian, “kemakmuran dan pembangunan” dan “melangkah maju” merupakan merepresentasikan otoritas. Itu dikarenakan kedua kata tersebut bisa terwujud karena suatu negara atau pemimpin memiliki otoritas. Tanpa adanya kewenangan yang mendapatkan legitimasi, maka keduanya tidak bisa terwujud. “Kemakmuran dan pembangunan” lebih mengacu kepada upaya untuk menunjukkan bahwa Presiden Jokowi ingin tetap menempatkan ekonomi sebagai strategi utama untuk mensejahterakan rakyat. Sedangkan “melangkah maju” mengacu kepada kebijakan untuk menjadi terdepan dan bergerak ke depan dalam penanganan perubahan iklim. Terdapat penekanan bahwa baik “kemakmuran dan pembangunan” dan “melangkah maju” tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keduanya merupakan upaya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Perubahan iklim memang sangat lekat dengan pengetahuan atau sains. Awal perkembangan isu tersebut juga dikarenakan kekhawatiran para ilmuwan tentang dampak perubahan iklim yang akan menjadi dunia semakin rentan dan berisiko. “Net zero emission” dan

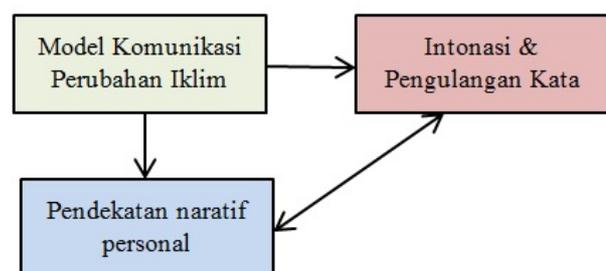
“transfer teknologi” merupakan dua frase yang berkaitan dengan pengetahuan. Net zero emission” menjadi tujuan utama dalam COP26. Dengan emisi nol persen diharapkan menjadikan dunia lebih aman dan layak ditinggali untuk masa depan. Sedangkan “transfer teknologi” masih menjadi kendali karena maju tidak berkomitmen mengenai hal itu kepada negara berkembang. Akibatnya, upaya penanganan perubahan iklim mengalami keterhambatan.

Dalam ideologi, peneliti memandang kata “kontribusi” sebagai ideologi yang diusung oleh Presiden Jokowi. Itu dikarenakan pidato pada COP26 lebih menonjolkan bagaimana kontribusi Indonesia pada penanganan perubahan iklim. Selain itu, Indonesia juga menuntut kontribusi dari negara maju kepada negara-negara berkembang mengenai pembiayaan dan pendanaan. Itu menunjukkan “kontribusi” menjadi ideologi dalam penanganan perubahan iklim di mana semua pihak harus memegang kata tersebut bukan hanya sekadar komitmen semata, tetapi dalam tindakan nyata.

Mengenai identitas, Presiden Jokowi menyebutkan frase “negara-negara berkembang” dan “negara maju”. Itu menunjukkan adanya pengkategorisasian yang dipahami oleh Presiden Jokowi. Itu juga berkaitan dengan adanya perbedaan pandangan dua kelompok negara tersebut dalam penanganan perubahan iklim. Indonesia sebagai “negara berkembang” merupakan kelompok yang berbeda dengan “negara maju”. Pengkategorisasi itu menimbulkan dampak pada stigmatisasi.

Negara maju hanya mau menang sendiri dalam penanganan perubahan iklim ketika menuntut negara berkembang untuk menerapkan kebijakan emisi nol persen. Ketika negara berkembang hendak menuntut kontribusi negara maju dalam penanganan perubahan iklim, ternyata tidak simbiosis mutualisme. Di situlah Indonesia mencoba mengambil peran dengan menyerukan persatuan dan penyatuan sikap di antara negara berkembang.

Sebenarnya antara intonasi dan pengulangan kata dengan pendekatan naratif memiliki keterkaitan satu sama lain. Itu karenanya merupakan pendekatan berbasis naratif sehingga menghasilkan model komunikasi yang solid.



Gambar 4. Model komunikasi perubahan iklim Presiden Jokowi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan banyak hal menarik dan patut digaris bawahi dalam hal komunikasi perubahan iklim yang dilakukan Presiden Jokowi pada COP26. Itu bukan hanya berkaitan dengan komunikasi yang berbasis pada narasi semata, tetapi bagaimana menunjukkan kebijakan dan prestasi penanganan perubahan iklim bisa disampaikan ke dunia internasional sehingga bisa menarik perhatian.

Adapun topik komunikasi perubahan iklim yang disampaikan Presiden Jokowi lebih mengarus-utamakan emisi nol persen dan pembangunan berkelanjutan. Keduanya merupakan hal yang kontras yang secara sengaja disampaikan pada forum para pemimpin dunia dengan tujuan menggugah semua pihak tentang penanganan perubahan iklim tidak bisa dilakukan dengan mengesampingkan pembangunan.

Mengenai strategi komunikasi perubahan iklim Presiden Jokowi pada COP26 lebih mengacu pada fakta dan data tentang penanganan perubahan iklim; kebijakan dan mekanisme penanganan perubahan iklim; tuntutan atas upaya penanganan perubahan iklim; target dan prioritas bahwa Indonesia menjadi motor penggerak dalam penanganan perubahan iklim; dan agenda kepemimpinan bahwa Presiden Jokowi berharap menjadi pemimpin global dalam perubahan iklim. Kelima strategi itu dilakukan menjadi satu kesatuan dengan tujuan agar Indonesia mendapatkan pengakuan global terhadap penanganan perubahan iklim yang sudah dilakukan.

Adapun model komunikasi perubahan iklim Presiden Jokowi didasarkan pengulangan dan intonasi pada kata dan frasa. Adapun pengulangan beberapa kata tersebut menjadi representasi penegasan dan keinginan Indonesia, seperti “perubahan iklim” dan “pembiayaan” yang dikategorikan sebagai *simple emphatic*. Selain itu, terdapat juga pendekatan naratif personal yang merujuk bagaimana Presiden Jokowi menunjukkan elemen seperti kekuasaan, otoritas, pengetahuan, ideologi dan identitas dalam pidatonya. Seperti kata “kontribusi” yang lebih menonjolkan sekadar komitmen semata, tetapi dalam tindakan nyata.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa peranan bahasa sangat penting dalam komunikasi perubahan iklim. Kerangka narasi dengan kata-kata (Nerlich, Koteyko, & Brown, 2009) memberikan upaya untuk memberikan pemahaman kepada publik. Diharapkan penelitian ini juga menggugah pihak-pihak yang terkait dalam komitmen penanganan perubahan iklim untuk membangun dialog. Kajian tentang perubahan iklim berusaha membuka mata dunia tentang pengetahuan dan diskusi lebih luas (Dudman & Wit, 2021).

Penelitian ini memang berbasis teoretikal dan empiris, tetapi hasil kajian bisa diterapkan dalam ranah praktis oleh para pemegang kebijakan penanganan perubahan iklim pada level pemerintahan baik level nasional hingga

daerah, organisasi nirlaba, dan pelaku industri ramah lingkungan dalam mengkomunikasikan kepada publik dengan pendekatan naratif. Berbagai strategi dan model komunikasi perubahan iklim yang ditemukan pada penelitian ini bisa diterapkan langsung dan adaptif sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan komunikator.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis pidato Presiden Jokowi pada COP26 semata. Peneliti tidak melakukan penelitian berbasis pada kebijakan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam penanganan perubahan iklim. Dengan demikian, penelitian ini lebih mengandalkan analisis dan interpretasi yang lebih sempit, meskipun aspek konteks juga telah digunakan.

Penelitian kedepannya bisa menerapkan studi kasus pada penelitif komunikasi perubahan iklim yang lebih luas dan komprehensif. Studi kasus bisa mengungkapkan lebih detail karena lebih fokus pada aspek komunikasi yang bukan hanya mengandalkan media sosial atau media massa, tetapi bisa menilai perspektif publik dalam menilai komunikasi perubahan iklim yang dilakukan pemerintahan.

REFERENSI

- Adi, W. T., & Mustaqim, A. H. 2017. The Development Of99 Cahaya Di Langit Eropa'movie Narration For Spiritual Education. *LEKSEMA: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 2(2), 145-159. <https://doi.org/10.22515/ljbs.v2i2.894>
- Akiyama, T., An, K. J., Furumai, H., & Katayama, H. (2013). The concept of environmental leader. Environmental leadership capacity building in higher education. In *Environmental Leadership Capacity Building in Higher Education: Experience and Lessons from Asian Program for Incubation of Environmental Leaders*, Takashi Mino & Keisuke Hanaki (eds), (pp. 19-40). New York: Springer.
- Altschuler, B., & Brownlee, M. (2016). Perceptions of climate change on the Island of Providencia. *Local Environment*, 21(5), 615-635. <https://doi.org/10.1080/13549839.2015.1004165>
- Chadwick, A. E. (2017). Climate change communication. In *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. Jon Nussbaum (Ed). London: Routledge. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.22>
- Dubey, S. K., & Sharma, D. (2018). Assessment of climate change impact on yield of major crops in the Banas River Basin, India. *Science of the Total Environment*, 635, 10-19. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.343>

- Dudman, K., & de Wit, S. (2021). An IPCC that listens: introducing reciprocity to climate change communication. *Climatic Change*, 168(1), 1-12. <https://doi.org/10.1007/s10584-021-03186-x>
- Etkin, D., & Ho, E. (2007). Climate change: perceptions and discourses of risk. *Journal of risk research*, 10(5), 623-641. <https://doi.org/10.1080/13669870701281462>
- Feindt, P. H., & Netherwood, A. (2012). Making sense of climate change: Notes on interpretive policy analysis and discourse analysis in sustainability research. In *Researching sustainability: A guide to social science methods, practice and engagement*. Alex Franklin & Paul Blyton (Eds.), (pp. 159-175). London: Routledge.
- Gjerstad, O., & Flottum, K. (2021). Climate change lifestyle narratives among Norwegian citizens: A linguistic analysis of survey discourse. *European Policy Analysis*, 7, 386-404. <https://doi.org/10.1002/epa2.1122>
- Howarth, C., & Parsons, L. (2021). Assembling a coalition of climate change narratives on UK climate action: a focus on the city, countryside, community and home. *Climatic Change*, 164(1), 1-19. <https://doi.org/10.1007/s10584-021-02959-8>
- Holzhausen, J., & Grecksch, K. (2021). Historic narratives, myths and human behavior in times of climate change: A review from northern Europe's coastlands. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 12(5), e723. <https://doi.org/10.1002/wcc.723>
- Jack, C. D., Jones, R., Burgin, L., & Daron, J. (2020). Climate risk narratives: An iterative reflective process for co-producing and integrating climate knowledge. *Climate Risk Management*, 29, 100239. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2020.100239>
- Kahn, M. E., Mohaddes, K., Ng, R. N., Pesaran, M. H., Raissi, M., & Yang, J. C. (2021). Long-term macroeconomic effects of climate change: A cross-country analysis. *Energy Economics*, 105624. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105624>
- Knowles, N. L., & Scott, D. (2021). Media representations of climate change risk to ski tourism: a barrier to climate action?. *Current Issues in Tourism*, 24(2), 149-156. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1722077>
- Langellier, K. M. (1989). Personal narratives: Perspectives on theory and research. *Text and performance quarterly*, 9(4), 243-276. <https://doi.org/10.1080/10462938909365938>
- Motta, M., Ralston, R., & Spindel, J. (2021). A Call to Arms for Climate Change? How Military Service Member Concern About Climate Change Can Inform Effective Climate Communication. *Environmental Communication*, 15(1), 85-98. <https://doi.org/10.1080/17524032.2020.1799836>
- Mustaqim, A. H. (2018). Strategi Komunikasi Politik Digital Pasca-Kebenaran. *Jurnal Dakwah Risalah*, 29(2), 116-132. <http://dx.doi.org/10.24014/jdr.v29i2.6317>
- Mustaqim, A. H. (2021). The Contestation of Political Storytelling in Presidential Candidates During the 2019 Federal Election. In *Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019)* (pp. 34-46). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210531.005>
- Nerlich, B., Koteyko, N., & Brown, B. (2010). Theory and language of climate change communication. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 1(1), 97-110. <https://doi.org/10.1002/wcc.2F>
- Nisbet, M. C., & Kotcher, J. E. (2009). A two-step flow of influence? Opinion-leader campaigns on climate change. *Science Communication*, 30(3), 328-354. <https://doi.org/10.1177/1075547008328797>
- Pearce, W., Niederer, S., Özkula, S. M., & Sánchez Querubin, N. (2019). The social media life of climate change: Platforms, publics, and future imaginaries. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 10(2), e569. <https://doi.org/10.1002/wcc.569>
- Pielke Jr, R. A. (2005). Misdefining "climate change": consequences for science and action. *Environmental Science & Policy*, 8(6), 548-561. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2005.06.013>
- Prakash, S. (2021). Impact of Climate change on Aquatic Ecosystem and its Biodiversity: An overview. *International Journal of Biological Innovations*, 3(2), 60-65. <https://doi.org/10.46505/IJBI.2019.120>
- Sampei, Y., & Aoyagi-Usui, M. (2009). Mass-media coverage, its influence on public awareness of climate-change issues, and implications for Japan's national campaign to reduce greenhouse gas emissions. *Global environmental change*, 19(2), 203-212. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.10.005>
- Scott, D., & Becken, S. (2010). Adapting to climate change and climate policy: Progress, problems and potentials. *Journal of Sustainable tourism*, 18(3), 283-295. <https://doi.org/10.1080/09669581003668540>

- Sekretariat Presiden. (2021, November 1). *Pidato Presiden Joko Widodo Pada KTT COP26, Glasgow, 1 November 2021*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=9dXm5Lg70sc>
- Singh, C. S. (2014). *Punjabi intonation: An experimental study*. Munchen: Lincom Europa.
- Supran, G., & Oreskes, N. (2021). Rhetoric and frame analysis of ExxonMobil's climate change communications. *One Earth*, 4(5), 696-719. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.04.014>
- Susila, I., Dean, D., Yusof, R. N. R., Setyawan, A. A., & Wajdi, F. (2020). Symbolic political communication, and trust: a young voters' perspective of the Indonesian presidential election. *Journal of Political Marketing*, 19(1-2), 153-175. <https://doi.org/10.1080/15377857.2019.1652224>
- Vu, H. T., Blomberg, M., Seo, H., Liu, Y., Shayesteh, F., & Do, H. V. (2021). Social media and environmental activism: Framing climate change on Facebook by global NGOs. *Science Communication*, 43(1), 91-115. <https://doi.org/10.1177/1075547020971644>
- Weitkamp, E., Milani, E., Ridgway, A., & Wilkinson, C. (2021). Exploring the digital media ecology: insights from a study of healthy diets and climate change communication on digital and social media. *Journal of Science Communication*, 20(3), A02. <https://doi.org/10.22323/2.20030202>
- Widodo, J. (2021). *Pidato Presiden Republik Indonesia Di KTT COP 26*. <https://www.presidentri.go.id/transkrip/pidato-presiden-republik-indonesia-di-ktt-cop-26/>. Diakses pada 5 November 2021.